

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia itu adalah Negara Hukum yang demokrasi (*demokratische rechtstaat*) dan sekaligus adalah Negara Demokrasi yang berdasarkan atau hukum (*constitutional democracy*) yang tidak terpisahkan satu sama lain. Sebagaimana disebutkan dalam naskah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa paham negara hukum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) berkaitan erat dengan paham negara kesejahteraan (*welfare state*) atau paham negara hukum materiil sesuai dengan bunyi alenia keempat Pembukaan dan Ketentuan Pasal 34 UUD 1945. Pelaksanaan paham negara hukum materiil akan mendukung dan mempercepat terwujudnya negara kesejahteraan di Indonesia.¹

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai sebuah instrumen hukum publik yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana materiil mempunyai tujuan penting yaitu mencari dan memperoleh kebenaran materiil. Seperti halnya tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Tercapainya ketertiban di

¹Ridlwan Zulkarnain, “*Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat*”, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 (2 Mei-Agustus 2012), hal. 143.

dalam masyarakat adalah dengan harapan kepentingan manusia akan terlindungi.²

Awal dari rangkaian peradilan pidana, adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah terjadi peristiwa pidana. Penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu harus dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan keterangan, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti yang diperlukan yang terukur dan terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana, yang itu tentang hakikat peristiwa pidana. Apabila pengumpulan alat bukti-alat bukti dalam peristiwa pidana itu telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, maka pemenuhan unsur dalam peristiwa pidana itu telah siap untuk diproses.³

Kecermatan penyidikan itu bertujuan untuk mendapatkan bukti-bukti yang diperlukan yang terkait dengan peristiwa pelanggaran hukum pidana. Hal ini merupakan langkah yang sangat penting untuk menemukan dan menentukan peristiwa pelanggaran hukum atau bukan pelanggaran pelanggaran hukum, yang didukung oleh ketercukupan unsur-unsur hukum dalam peristiwa tindak pidananya. Proses dimulainya penyidikan dan penyelidikan harus selalu berpedoman kepada hukum formil atau hukum acara, baik hukum acara yang diatur dalam KUHAP yaitu dalam Pasal 75; Pasal 102; Pasal 103; Pasal 104; Pasal 105; Pasal 106; Pasal 107; Pasal 108 ayat 4, 5, 6; Pasal 109; dan Pasal 110 ayat 1, maupun hukum yang diatur di

²Amrullah, "Urgensi Saksi Mahkota dalam Persidangan Pidana di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Peuradeun* (Media Kajian Ilmiah Sosial Politik, Hukum, Agama dan Budaya , Vol. II (02 May 2014)), hal.89.

³Hartono, 2012, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.1.

luar KUHAP yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana; Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana; Peraturan Direktur Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gelar Pengaduan Kasus, termasuk juga hakikat dari kepentingan hukum itu sendiri, karena hukum dalam perkara ini sangat menentukan arah identifikasi peristiwa tentang ada dan tidak adanya peristiwa pidana yang telah dilanggar.⁴

Mengenai pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan diperlukan beberapa tahap-tahap agar dalam menentukan ada atau tidaknya peristiwa pidana dan menentukan siapa orang yang bisa ditetapkan menjadi tersangka dalam suatu perkara pidana agar tidak terjadi kesalahan dalam penetapannya. Tahap-tahap dalam penyelidikan itu sendiri diatur di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyelidikan Tindak Pidana pada Pasal 15 yang berisi sebagai berikut:

1. *Penyelidikan*
2. *Pengiriman SPDP*
3. *Upaya paksa*
4. *Pemeriksaan*
5. *Gelar perkara*
6. *Penyelesaian Berkas Perkara*
7. *Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum*
8. *Penyerahan tersangka dan barang bukti, dan*
9. *Penghentian penyidikan.*

⁴*Ibid.*, hal. 3.

Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian untuk menentukan langkah selanjutnya dalam penyidikan dan juga menetapkan seseorang yang disangkan sebagai tersangka dengan melakukan gelar perkara. Gelar perkara itu sendiri yaitu merupakan upaya berupa kegiatan penggelaran proses perkara yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka menangani tindak pidana tertentu sebelum diajukan kepada Penuntut Umum.⁵

Fungsi gelar perkara dalam penyidikan tindak pidana merupakan salah satu upaya untuk membantu penyidikan dalam memberikan gambaran yang objektif dan jelas akan status hukum dan aspek hukum suatu permasalahan bagi penyidik pada suatu kasus yang menurut penilaian penyidik tidak jelas.⁶

Sebagai salah satu contoh pelaksanaan gelar perkara yaitu dilaksanakan oleh Polres Malang terhadap kasus kematian mahasiswa ITN Malang, Fikri Dolasmantya Surya yang merupakan mahasiswa baru jurusan Planologi Institut Teknologi Nasional Malang. Dari gelar perkara yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur tersebut menghasilkan, dengan menetapkan 4 (empat) orang sebagai tersangka dalam kasus kematian mahasiswa tersebut.⁷ Dengan dilaksanakannya gelar perkara oleh Kepolisian dapat membantu mencari titik terang dalam pengungkapan kasus yang sedang berjalan ataupun sedang ditangani oleh Kepolisian. Dan juga agar dalam proses penanganan

⁵<http://www.gresnews.com> Diunduh hari Selasa tanggal 15 September 2015 jam 19.00 WIB.

⁶<http://digilib.unila.ac.id/9270/4/4.%20ABTRAK%20SKRIPSI.pdf> Diunduh hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 jam 21.11 WIB .

⁷<http://dikabarkan.info/li/polda-jatim-gelar-perkara-kasus-kematian-mahasiswa-itn-malang> Diunduh hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 jam 21.42 WIB .

kasus pihak penyidik terutama penyidik kepolisian tidak salah dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam rangka penulisan hukum (skripsi) dengan judul: “PROSES PELAKSANAAN GELAR PERKARA (STUDI URGENSI GELAR PERKARA DALAM KELANCARAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan gelar perkara dalam kelancaran proses penyelesaian perkara pidana?
2. Bagaimana proses pelaksanaan gelar perkara dalam penyidikan perkara pidana?
3. Hambatan-hambatan apa sajakah yang dialami dalam pelaksanaan gelar perkara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang sudah dijelaskan maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran pentingnya proses gelar perkara dalam kelancaran penyelesaian perkara pidana.
2. Untuk mengetahui proses gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik dalam mengungkap perkara pidana.
3. Untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh penyidik dalam pelaksanaan gelar perkara.

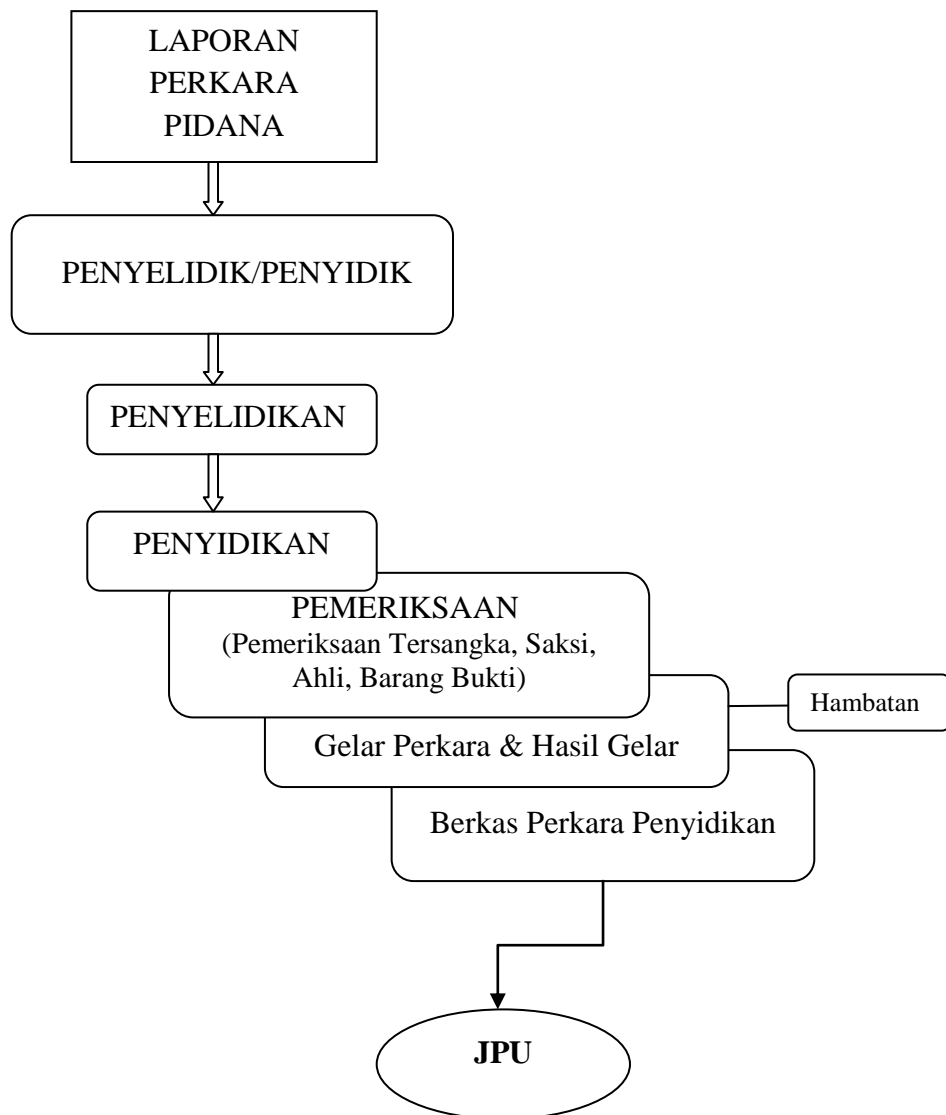
D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, manfaat yang sekiranya dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Mengembangkan pengetahuan di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana.
 - b. Memberikan sumbangan referensi bagi ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana dalam hal proses pelaksanaan gelar perkara.
2. Manfaat praktis

Memberikan sumbangan pemikiran dan wacana yang luas bagi aparat penegak hukum khususnya penyidik maupun masyarakat tentang bagaimana proses beracara pidana, terutama dalam hal penanganan perkara pidana yaitu proses pelaksanaan gelar perkara oleh pihak penyidik Kepolisian.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1. Bagan Kerangka Pemikiran

Berangkat dari kerangka pemikiran tersebut di atas, akan penulis jadikan sebagai pedoman untuk menjawab permasalahan yang sudah ditetapkan yaitu bagaimana jalannya proses pelaksanaan gelar perkara di Kepolisian dalam menyelesaikan kasus yang sedang ditangani untuk melengkapi berkas-berkas penyidikan yang akan diserahkan kepada penyidik Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum), dari pertama laporan mulai masuk sampai

dengan gelar perkara dilaksanakan dan menghasilkan hasil gelar perkara yang oleh penyidik dijadikan satu dengan berkas perkara yang akan di serahkan kepada JPU untuk diproses lebih lanjut.

Penyidikan adalah suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyelesaian atau siasat (Malaysia), KUHAP sendiri memberikan pengertian dalam Pasal 1 angka 2, sebagai berikut:⁸

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Definisi gelar perkara menurut Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana terdapat pada pasal 1 ayat (17) yaitu:

“Gelar perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses atau hasil penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik kepada peserta gelar dalam bentuk diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan /koreksi dalam rangka menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyidikan”.

Menurut Yockie Suryo Prayogo bahwa gelar perkara adalah satu langkah yang harus dilakukan oleh aparat Penegak Hukum sebelum memutuskan apakah seseorang itu patut diduga berdasarkan bukti-bukti materiil yang terkumpul dan diperiksa untuk dijadikan sebagai tersangka tindak pidana satu pelanggaran hukum tertentu.⁹

⁸Muhammad Rusli, 2012, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, hal. 17.

⁹[http://jsop.net/2013/02/28/gelar-perkara-polda/Yockie Suryo Prayogo](http://jsop.net/2013/02/28/gelar-perkara-polda/Yockie%20Suryo%20Prayogo), Sabtu, Pukul 20.20 WIB.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Pendekatan yuridis yaitu metode yang digunakan untuk mendekati masalah ditinjau dari aspek perundang-undangan. Pendekatan empiris adalah sebagai wujud mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup di masyarakat. Jadi dengan kata lain, pendekatan empiris harus dilakukan di lapangan.¹⁰ Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris penulis ingin mengkaji secara yuridis dan empiris pelaksanaan gelar perkara dalam proses penyelesaian perkara pidana, khususnya di Karanganyar.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini, analisa data tidak keluar dari lingkup sampel. Bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.¹¹ Dalam penelitian ini penulis dapat mendiskripsikan tentang bagaimana pelaksanaan gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik dalam

¹⁰Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hal. 61.

¹¹Sunggono Bambang, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, hal. 38.

penyelesaian perkara pidana dan hambatan apa saja yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan gelar perkara pidana tersebut.

3. Lokasi Penelitian

Dalam memperoleh data yang diperlukan guna menunjang penulisan skripsi ini maka penulis melakukan penelitian di wilayah hukum Polres Karanganyar. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Karanganyar dikarenakan di Polres Karanganyar mempunyai banyak kasus yang dilakukan gelar perkara dan sekaligus mempermudah penelitian dan menghemat biaya.

4. Jenis data

- a. Data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertama¹² yaitu dari Polres Karanganyar.
- b. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Data sekunder yang dimaksud adalah:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

¹²Amiruddin, H. Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pres, hal. 30.

- d) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana.
 - e) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.
 - f) Peraturan Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gelar Pengaduan Kasus.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum atau ensiklopedia.¹³

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian lazimnya dikenai tiga jenis alat pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview.¹⁴

Penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui studi dokumen atau bahan pustaka untuk mengelola data sekunder dan wawancara atau interview langsung kepada narasumber yang

¹³*Ibid.*, hal. 31.

¹⁴*Ibid.*, hal. 32.

bersangkutan yaitu Sat Reskrim Polres Karanganyar untuk memperoleh data primer.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang sesuai adalah menggunakan analisis data kualitatif, yaitu pembahasan yang dilakukan dengan cara mengadukan antara penelitian kepustakaan dengan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data primer yang diperoleh dan diolah sebagai suatu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan.

Adapun pengambilan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Metode deduktif adalah metode yang ingin memahami sesuatu dari yang umum ke yang khusus, dengan cara berpikir dimulai dari pokok permulaan dengan menguraikan semua hal yang terkandung atau mungkin dapat disusun atas dasar tersebut, sehingga seluruh jalan pemikiran tidak ada yang bertentangan.¹⁵ Oleh karena itu, peneliti berpangkal tolak pada Peraturan tentang Pelaksanaan Gelar Perkara yang berlaku pada masyarakat dan menarik kesimpulan dalam penerapannya untuk penyelesaian permasalahan kasus di Karanganyar.

G. Sistematika Skripsi

Untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan dan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan penulisan skripsi ini maka penulis membuat suatu sistematika dalam penyusunan skripsi ini.

¹⁵Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, hal. 99.

Sistematika penulisan terdiri dari 4 (empat) bab-bab yang disesuaikan dengan lingkup pembahasan. Adapun sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan, dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, dalam bab ini dibahas mengenai: 1) Tinjauan umum tentang sistem peradilan pidana; 2) Tinjauan umum tentang gelar perkara; 3) Tinjauan umum tentang penyidikan.

Bab III adalah Hasil penelitian dan pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai kedudukan gelar perkara dalam kelancaran proses penyelesaian perkara pidana, proses pelaksanaan gelar perkara dalam penyidikan perkara pidana, hambatan-hambatan apa yang dialami dalam pelaksanaan gelar perkara.

Bab IV adalah bagian penutup yang berisikan kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.